



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : **BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**
UNIT KERJA : **ANGGOTA BIDANG PENGUSAHAAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DENDI GUSTINANDAR**
2. Jabatan : **DIREKTUR BADAN USAHA PELABUHAN**
3. NHK : **629437**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **2.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/91 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , WARISAN Rp. 900.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **282.500.000**

1. MOBIL, HONDA MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2SV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **79.374.000**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **483.288.988**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **---**

Sub Total

Rp. **3.145.162.988**

III. HUTANG

Rp. **17.000.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.128.162.988

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.